

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM SISTEM PELAPORAN ORANG ASING DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENGAWASAN KEIMIGRASIAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN PRISMA**

**PUBLIC PARTICIPATION IN THE FOREIGN NATIONALS REPORTING SYSTEM AND
ITS IMPLICATIONS FOR IMMIGRATION OVERSIGHT USING THE PRISMA
APPROACH**

<https://10.0.205.137/tematics.v8i1.914>

Submitted: 03-05-2026 Reviewed: 18-05-2026 Published: 10-06-2026

Ahmad D. M. Syahid
ahmaddzukhfriza@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Besse Hartati
hartatimassale@yahoo.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Galuh Boy Hertantyo
galuhboyh@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Abstract *Immigration control is an important function of the state in regulating the presence and activities of foreign nationals in accordance with applicable laws. Limited administrative resources necessitate a control approach that involves community participation through public reporting mechanisms. This study aims to analyse the role of community participation and public reporting mechanisms in supporting the effectiveness of immigration control through the Systematic Literature Review (SLR) method with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) approach. The literature search and selection process was conducted through several scientific databases with stages of identification, screening, and eligibility assessment in accordance with the PRISMA framework. The results of the study show that community participation and public reporting contribute to strengthening early detection of potential immigration violations and expanding the scope of supervision. However, its implementation still faces challenges such as public digital literacy, information verification, and personal data protection. This study emphasises the importance of integrating public participation and information technology to support more effective and responsive immigration monitoring.*

Keywords: *Immigration monitoring, community participation, public reporting, PRISMA, systematic literature review.*

Abstrak *Pengawasan keimigrasian merupakan fungsi penting negara dalam*



mengendalikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterbatasan sumber daya aparatur mendorong

103 | TEMATICS | Vol 7 | No. 2 | 2025

perlunya pendekatan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dan mekanisme pelaporan publik dalam mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian melalui metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Proses penelusuran dan seleksi literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah dengan tahapan identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan sesuai kerangka PRISMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pelaporan publik berkontribusi dalam memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian serta memperluas jangkauan pengawasan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti literasi digital masyarakat, verifikasi informasi, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi partisipasi publik dan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci: *Pengawasan keimigrasian, partisipasi masyarakat, pelaporan publik, PRISMA, studi literatur sistematis.*

1. PENDAHULUAN

Pengawasan Keimigrasian adalah salah satu tugas Imigrasi dalam menjaga keamanan negara dengan melakukan pengawasan baik secara administratif maupun lapangan terhadap Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia di Wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan amanah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang dapat merusak kesatuan bangsa, sesuai dengan Pasal 2 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan melalui serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakkan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Keseluruhan kegiatan tersebut bertujuan memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di samping itu, juga diperlukan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak Imigrasi atau Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di wilayahnya.

Selain itu, pemilik penginapan dan pemilik perusahaan dapat ikut secara aktif melaporkan Orang Asing di wilayah Indonesia. Pelaporan ini merupakan bagian dari pengawasan yang menjadi core tugas dan fungsi Imigrasi.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat luas dalam melaporkan keberadaan orang asing, pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Indonesia dapat lebih ketat, karena segala laporan yang diberikan dapat digunakan oleh petugas imigrasi sebagai data untuk pengawasan dan operasi terhadap WNA. Pada akhirnya, pelanggaran aturan dan hukum oleh WNA dapat diminimalisir. Namun pada prakteknya masih banyak masyarakat umum, pihak penginapan/hotel maupun pihak perusahaan yang mengerjakan TKA belum memahami bahwa Imigrasi mempunyai wewenang untuk memasuki suatu tempat dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam ranah pemerintahan merupakan keterlibatan warga negara secara sukarela dalam proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pengawasan fungsi publik. Konteks keamanan nasional mentransformasi partisipasi ini menjadi fungsi kontrol sosial yang membantu otoritas dalam memetakan potensi gangguan. Dwiyanto (2015) menjelaskan bahwa partisipasi bukan hanya sekadar hak, melainkan kewajiban moral masyarakat dalam menjaga integritas wilayah dari ancaman luar.

Pendekatan integratif diperlukan untuk memahami pola interaksi masyarakat dengan sistem pelaporan. Slamet (2021) berpendapat bahwa efektivitas pengawasan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan orang asing menjadi instrumen deteksi dini yang paling organik dalam sistem keamanan nasional.

B. Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA)

Sistem Pelaporan Orang Asing atau Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan manifestasi dari transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Perangkat digital ini dirancang untuk mengotomasi kewajiban pelaporan yang diatur secara yuridis dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Kemampuan sinkronisasi data secara real-time antara pihak pelapor dengan pangkalan data keimigrasian menjadi fitur utama sistem tersebut. Pratama dan Santoso (2022) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi APOA ditentukan oleh faktor kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh penggunanya. Yusuf (2023) mengidentifikasi tiga elemen krusial dalam keberhasilan sistem pelaporan digital, yakni validitas data, integrasi intelijen, dan kerahasiaan identitas pelapor.

C. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penegakan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah kedaulatan

105 | TEMATICS | Vol 7 | No. 2 | 2025

negara. Fungsi ini mencakup pengawasan administratif dan lapangan yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap izin tinggal yang berlaku. Arifin (2020) menegaskan bahwa

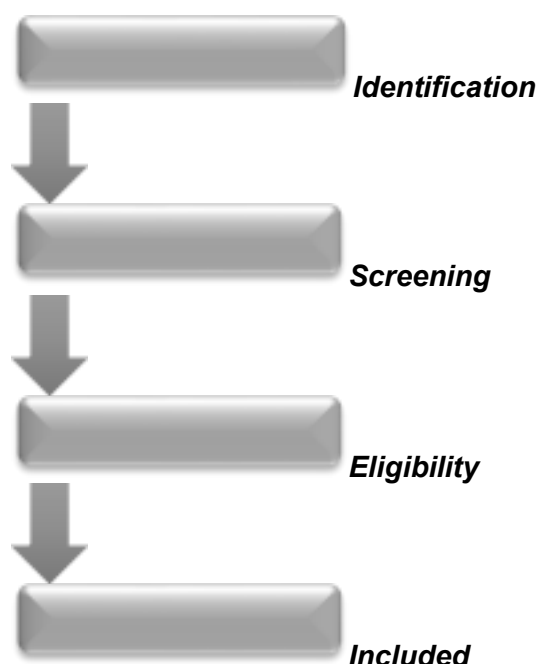
sinergitas antara instansi pemerintah dan elemen masyarakat merupakan kunci utama dalam meminimalisir pelanggaran keimigrasian.

Partisipasi publik yang terstruktur melalui sistem informasi menciptakan ekosistem pengawasan preventif bagi instansi berwenang. Ketentuan Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011 mewajibkan setiap orang asing untuk memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas dan keluarganya kepada petugas imigrasi.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengimplementasikan survei literatur komprehensif guna membedah keterlibatan masyarakat dalam sistem pelaporan warga negara asing serta dampaknya bagi efektivitas pengawasan keimigrasian. PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) digunakan sebagai kerangka kerja operasional yang terbagi ke dalam empat fase utama: penentuan kriteria kelayakan, identifikasi sumber informasi, seleksi literatur secara sistematis, dan proses ekstraksi data.

PRISMA 2020 Statement diterapkan guna memastikan pelaporan tinjauan sistematis dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk memetakan beragam elemen yang memengaruhi kontribusi publik dalam memperkuat kedaulatan negara melalui fungsi pengawasan imigrasi di wilayah Indonesia. Teknis pelaksanaan riset mencakup standarisasi parameter kecocokan dokumen, pemetaan basis data sumber, kurasi artikel ilmiah, hingga kodifikasi butir-butir data yang relevan. Cronin, Ryan, dan Coughlan (2008) menyatakan bahwa pendekatan langkah-demi-langkah ini sangat krusial untuk menghasilkan analisis literatur yang kredibel.



Gambar 1. Metode Pendekatan PRISMA

Alur metodologi yang divisualisasikan pada Gambar 1 merepresentasikan tahapan

sistematis yang diawali dengan *identification* melalui penetapan parameter inklusi dan sumber data, berikutnya adalah *screening*, di mana dilakukan penyaringan artikel berdasarkan kesesuaian topik keterlibatan publik dan APOA. Tahap penyaringan yang ketat sangat penting untuk memastikan data yang dianalisis memiliki validitas tinggi. Proses *eligibility* kemudian dilaksanakan melalui evaluasi mendalam terhadap substansi teks untuk meninjau korelasi variabel penelitian dengan mekanisme pengawasan. Kualitas hasil tinjauan sistematis sangat bergantung pada ketepatan peneliti dalam menyeleksi artikel yang memenuhi standar metodologi. Tahap akhir merupakan *included*, yaitu penetapan literatur final yang memiliki relevansi paling tinggi untuk dikonstruksikan sebagai basis analisis utama dalam pembahasan.

a. *Identification*

Tahap awal riset difokuskan pada perumusan standar kecocokan literatur melalui kriteria inklusi (IC) dan pemilihan basis data referensi. Langkah ini bertujuan untuk mengunci lingkup pencarian agar tetap selaras dengan domain pengawasan keimigrasian serta peran aktif masyarakat. Parahoo (2006) menyatakan bahwa setiap tahapan dalam proses penelitian harus didasarkan pada prinsip-prinsip metodologis yang terstruktur.

Parameter Standarisasi Artikel:

- 1) IC1 (Kriteria Inklusi 1): Sumber data harus berupa karya tulis ilmiah orisinal atau artikel jurnal hasil penelitian yang dipublikasikan dalam format bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kitchenham et al. (2010) menggarisbawahi pentingnya pemilihan studi primer yang berkualitas guna menghasilkan kesimpulan yang objektif.
- 2) IC2 (Kriteria Inklusi 2): Dokumen yang digunakan dibatasi pada periode publikasi lima tahun terakhir, yakni antara tahun 2020 hingga 2024, guna menjamin aktualitas informasi terkait dinamika sistem pelaporan digital kontemporer.

IC3 (Kriteria Inklusi 3): Artikel terpilih wajib memiliki substansi yang dapat mensintesis peran teknologi informasi dalam memfasilitasi laporan masyarakat terhadap penguatan operasional pengawasan keimigrasian di lapangan.

Penetapan Sumber Informasi:

Pencarian literatur dilakukan secara ekstensif pada berbagai pangkalan data akademik bereputasi global dan nasional, meliputi Scopus, ScienceDirect, Portal Garuda, dan Google Scholar. Strategi pencarian menggunakan kombinasi istilah kunci yang mencakup "partisipasi publik", "pelaporan orang asing", serta "pengawasan keimigrasian" Hall et al. (2012) menunjukkan bahwa ketajaman dalam pemilihan kata kunci pada database digital sangat menentukan jumlah artikel relevan yang terjaring. Penggunaan operator logika dalam kata kunci ini dipastikan mampu menjaring dokumen yang memiliki hubungan kausalitas langsung dengan objek studi yang sedang diteliti.

b. *Screening*

Proses penyaringan awal dilakukan terhadap seluruh literatur yang terjaring guna
107 | TEMATICS | Vol 7 | No. 2 | 2025
mengeliminasi artikel duplikat maupun dokumen yang tidak relevan secara substansial. Pemeriksaan judul serta abstraksi menjadi instrumen utama dalam menentukan apakah sebuah studi layak diteruskan ke analisis berikutnya. Surbakti dkk. (2025) menegaskan bahwa ketelitian pada fase ini krusial untuk menghasilkan basis data yang valid dan bebas

dari redundansi informasi.

Dokumentasi alasan eksklusi merupakan syarat mutlak dalam proses transparansi riset agar hasil tinjauan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Kriteria eksklusi (EC) dalam penelitian ini mencakup dokumen tanpa metodologi yang jelas, artikel, serta literatur yang hanya membahas aspek administrasi tanpa menyentuh dimensi pengawasan. Wahyudi (2022) berpendapat bahwa seleksi literatur yang ketat dalam kajian hukum bertujuan untuk menjaga fokus analisis pada regulasi yang masih berlaku. Penyaringan ini memastikan bahwa hanya artikel yang membahas partisipasi publik dan pelaporan orang asing yang masuk ke tahap evaluasi mendalam

c. *Eligibility*

Evaluasi mendalam terhadap dokumen lengkap (*full-text*) dilakukan pada tahap ketiga untuk memastikan terpenuhinya standar kelayakan konten. Penilaian ini difokuskan pada keberadaan data empiris terkait korelasi partisipasi masyarakat dengan efektivitas pengawasan keimigrasian di Indonesia. Pramono (2021) mengemukakan bahwa kualitas hasil tinjauan sistematis sangat bergantung pada ketepatan seleksi artikel yang memiliki relevansi topik secara spesifik dan mendalam.

Sikap kritis peneliti sangat diperlukan dalam menilai aplikabilitas temuan literatur terhadap konteks kebijakan keimigrasian nasional. Proses eliminasi pada fase kelayakan ini mengecualikan tulisan yang tidak dapat diakses secara utuh, artikel yang hanya bersifat tinjauan ulang tanpa temuan baru, serta dokumen di luar ranah ilmu sosial dan hukum. Hakim (2024) memandang seleksi tahap ini sebagai penyaring akhir guna menjamin bahwa hanya studi bermutu tinggi yang diinklusi dalam proses sintesis.

Tabel 1. Pengumpulan Data

Sumber	Kata Kunci	Kandidat	Terpilih
Google Scholar	Partisipasi Masyarakat, Pelaporan Publik, dan PIECES	1781	5
Crossref	Partisipasi Masyarakat, Pelaporan Publik, dan PIECES	409	5
OpenAlex	Partisipasi Masyarakat, Pelaporan Publik, dan PIECES	22	2
Semantic Scholar	Partisipasi Masyarakat, Pelaporan Publik, dan PIECES	0	0
Total		2212	12

d. *Included*

Penentuan artikel final yang memenuhi seluruh kriteria inklusi menjadi langkah penutup dalam prosedur PRISMA ini. Pemilihan studi didasarkan pada kesesuaian menyeluruh

terhadap tujuan pemetaan kontribusi public dalam memperkuat kedaulatan negara melalui pengawasan imigrasi. Analisis data dilakukan dengan menyajikan hasil ekstraksi dalam bentuk tabel pemetaan untuk mempermudah narasi pembahasan secara ilmiah.

Hasil akhir dari rangkaian sistematis ini menjadi fundamen utama dalam menganalisis implikasi partisipasi publik terhadap transformasi pengawasan keimigrasian. Yusuf (2023) menjelaskan bahwa sintesis dari artikel yang terpilih harus mampu memberikan jawaban objektif terhadap fenomena yang diteliti guna memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi instansi pemerintah. Fokus utama diletakkan pada artikel yang memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas aplikasi pelaporan orang asing di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menerapkan kerangka sistematis guna mengidentifikasi determinan partisipasi masyarakat dalam pelaporan orang asing untuk memperkuat pengawasan imigrasi. Peninjauan literatur dilakukan melalui mekanisme "Studi Terpilih" dengan fokus integrasi teknologi informasi sesuai metodologi Snyder (2019). Hasil penelaahan mencakup identitas jurnal, kategorisasi variabel, serta pemetaan metodologi studi primer. Prosedur terperinci tersebut menjamin validitas simpulan penelitian sebagaimana ditekankan Kitchenham et al. (2010).

Tabel 2. Sumber Publikasi

No.	Judul	Tahun	Jenis
1	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Informasi Publik Digital PPID Diskominfo...	2025	Jurnal
2	Analisis Kinerja Sistem dan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi LAPOR menggunakan Metode PIECES...	2024	Jurnal
3	Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan Pelayanan Publik melalui Inovasi SP4N-LAPOR...	2024	Jurnal
4	Analisis Kinerja Aplikasi LAPOR menggunakan Metode PIECES...	2023	Jurnal
5	Evaluasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik menggunakan Metode PIECES...	2025	Jurnal
6	Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat dan Pemahaman Peraturan Pemerintah...	2020	Jurnal
7	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik...	2023	Jurnal
8	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat...	2021	Jurnal
9	Komunikasi Kebijakan Publik yang Efektif: Peran Public Affairs...	2026	Jurnal
10	Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik...	2023	Jurnal
11	Transformasi Digital Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID)...	2023	Artikel
12	Pengembangan Sistem Layanan Informasi dan Laporan Pengaduan Warga menggunakan Metode PIECES...	2025	Artikel

Tabel 3. Fokus dan Metode Pendekatan

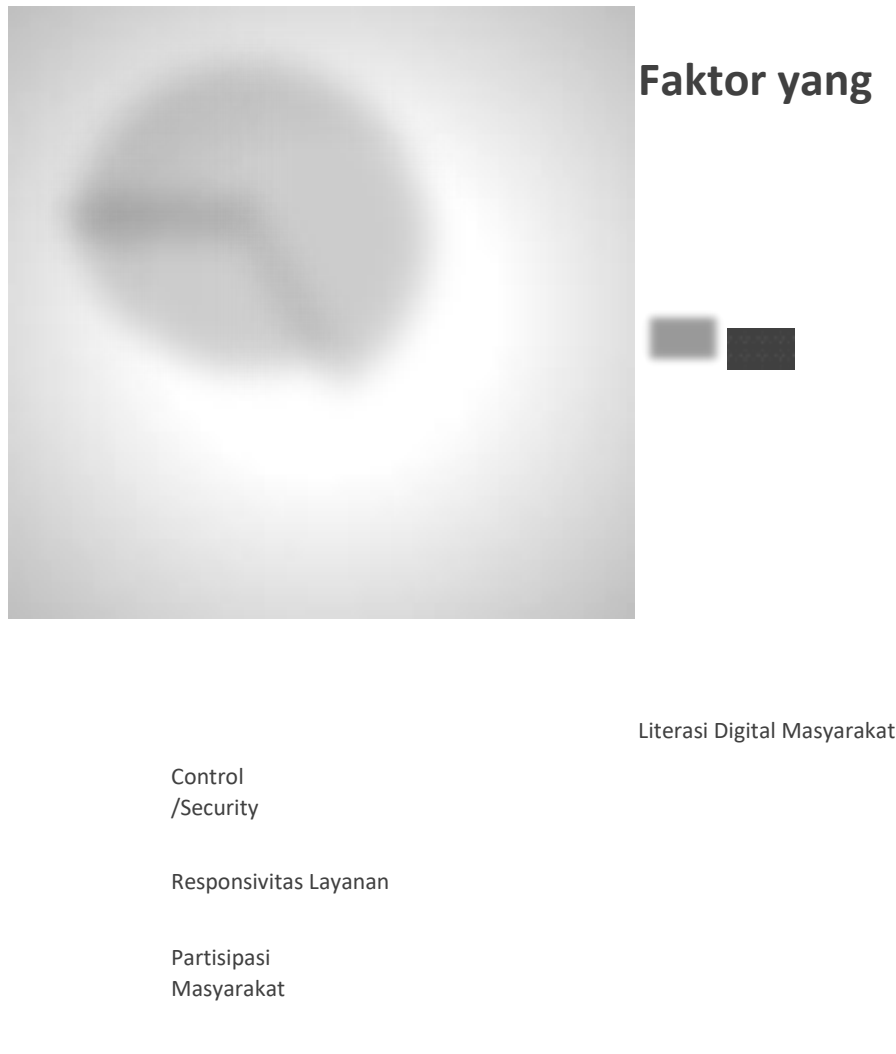
Penulis	Tahun	Faktor yang Berpengaruh	Metode
Nur Azel Wulandari, NPA Prabawati	2026	Partisipasi masyarakat	Kuantitatif
P Pakaya, L Hadjaratie, M Poli	2024	Literasi digital masyarakat	PIECES Framework

109 | TEMATICS | Vol 7 | No. 2 | 2025

Penulis	Tahun	Faktor yang Berpengaruh	Metode
MN Fahasiin, M Meltarini	2024	Literasi digital masyarakat	PIECES Framework
P Pakaya, R Raupu, MS Tuloli	2023	Control/Security	PIECES Framework
ID Destinaya, S Wulandari, D Irawan	2025	Responsivitas layanan	PIECES Framework
Ni Made Meisi Cahyani, Anak Agung Ketut Agus Suardika	2020	Partisipasi masyarakat	Kualitatif-Deskriptif
Ghaida Shaumi Manganti	2023	Partisipasi masyarakat	Kualitatif-Deskriptif
Ida Bagus Agung Yuda Andika, Ni Wayan Alit Erlina Wati	2021	Responsivitas layanan	Kualitatif-Deskriptif
Rizki Syahbani, Rachmandita Oktavian, Faris Aulia Riski, Tria Patrianti	2023	Literasi digital masyarakat	Kualitatif-Deskriptif
Aenal Fuad Adam, Syahrabudin Husein, Enala, Fransin Kontu, Muhammad Novan Prasetya	2023	Literasi digital masyarakat	Kualitatif-Deskriptif
Erwin Mardinata, Tomy Dwi Cahyono, Reza Muhammad Rizqi	2023	Literasi digital masyarakat	Kualitatif-Deskriptif
Okta Irawati, Iis Istiqomah, Andriansyah	2025	Responsivitas layanan	PIECES Framework

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat beragam faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi beserta metodologi pengukurannya dalam konteks

pelaporan publik. Klasifikasi temuan dari berbagai studi terdahulu tersebut menyediakan kerangka kerja komprehensif bagi peneliti untuk memetakan variasi pendekatan dan menentukan desain penelitian yang paling relevan.



Gambar 2. Diagram Faktor yang berpengaruh

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa faktor yang berpengaruh paling sering yaitu literasi digital masyarakat (42%), diikuti oleh control/security (8%), responsivitas layanan (25%), dan partisipasi masyarakat (25%). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek literasi digital masyarakat merupakan variabel paling dominan yang memengaruhi efektivitas mekanisme pelaporan orang asing.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, partisipasi publik dalam sistem pelaporan orang asing merupakan elemen strategis dalam penguatan pengawasan keimigrasian karena mampu memperluas jangkauan informasi, mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, serta membantu aparat imigrasi dalam mengatasi keterbatasan pengawasan di lapangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pelaporan publik sangat dipengaruhi oleh literasi digital masyarakat, kecepatan dan ketepatan respons institusi, keamanan sistem, serta tingkat kepercayaan publik terhadap tindak lanjut laporan. Keberhasilan pengawasan tidak cukup ditopang oleh ketersediaan teknologi semata, melainkan juga oleh tata kelola layanan yang kredibel, adaptif, dan akuntabel.

Penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Imigrasi beserta unit pelaksana teknis: (1) memperkuat edukasi publik mengenai kewajiban dan mekanisme pelaporan orang asing; (2) menyederhanakan kanal pelaporan agar lebih mudah diakses; (3) meningkatkan kapasitas verifikasi dan respons atas laporan masyarakat; (4) menjamin perlindungan data dan identitas pelapor; serta (5) mengintegrasikan informasi hasil pelaporan publik dengan fungsi intelijen dan pengawasan lapangan guna mewujudkan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan

5. HASIL

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi public dalam system pelaporan orang asing merupakan elemen strategis dalam penguatan pengawasan keimigrasian karena mampu memperluas jangkauan informasi, mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, serta membantu aparat imigrasi dalam mengatasi keterbatasan pengawasan di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pelaporan publik sangat dipengaruhi oleh literasi digital masyarakat, kecepatan dan ketepatan respons institusi, keamanan sistem, serta tingkat kepercayaan publik terhadap tindak lanjut laporan, sehingga keberhasilan pengawasan tidak cukup ditopang oleh ketersediaan teknologi semata, melainkan juga oleh tata kelola layanan yang kredibel, adaptif, dan akuntabel. Penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Imigrasi beserta unit pelaksana teknis memperkuat edukasi publik mengenai kewajiban dan mekanisme pelaporan orang asing, menyederhanakan kanal pelaporan agar lebih mudah diakses, meningkatkan kapasitas verifikasi dan respons atas laporan masyarakat, menjamin perlindungan data dan identitas pelapor, serta mengintegrasikan informasi hasil pelaporan publik dengan fungsi intelijen dan pengawasan lapangan guna mewujudkan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Wulandari, N. P. R., & Prabawati, N. P. (2025). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam layanan informasi publik digital PPID Diskominfo Kabupaten Badung. *Socio-political* 111 | TEMATICS | Vol 7 | No. 2 | 2025
Communication and Policy Review, 2(6). DOI: 10.61292/shkr.303.
- Pakaya, P., Hadjaratie, L., Polin, M., & Yusuf, R. (2024). Analisis kinerja sistem dan tingkat kepuasan pengguna aplikasi LAPOR menggunakan metode PIECES framework di Dinas Kominfo Kota Gorontalo. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 4(2), 226–236. DOI: 10.37031/diffusion.v4i2.25285.
- Fahasiin, M. N., & Meltarini, M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik melalui inovasi SP4N-LAPOR di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah [Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Pakaya, P., Raupu, R., Tuloli, M. S., & Muthia, M. (2023). Analisis kinerja aplikasi layanan

aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) menggunakan metode PIECES. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 3(2), 32–40. DOI: 10.37031/diffusion.v3i2.19862.

Destinaya, I. D., Wulandari, S., Irawan, D., Gunawan, S., & Iqbal, M. (2025). Evaluasi sistem informasi permohonan elektronik menggunakan metode PIECES. *Jurnal Informatika*, 25(2), 57–71. DOI: 10.30873/jurnal informatika.v25i111.

Cahyani, N. M. M., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 544–571. doi:10.32795/hak.v1i2.998.

Manganti, G. S. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(11), 380–389. doi:10.56393/decive.v3i11.2053.

Andika, I. B. A. Y., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 340–350. doi:10.32795/hak.v2i4.2023.

Syahbani, N. A. R., Oktavian, R., Riski, F. A., & Patrianti, T. (2026). Komunikasi kebijakan publik yang efektif: Peran public affairs dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3(1), 180–187. doi:10.62383/komunikasi.v3i1.887.

Adam, A. F., Enala, S. H., Kontu, F., & Prasetya, M. N. (2023). Sosialisasi dan pelatihan peningkatan partisipasi politik dan kebijakan publik. *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 165. doi:10.33633/ja.v6i1.1017.

Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (SID): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>.

Irawati, O., Istiqomah, I., & Andriansyah, A. (2025). Pengembangan sistem layanan informasi dan laporan pengaduan warga menggunakan metode PIECES berbasis Android dengan studi kasus RT.03 Tegal Rotan, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(6), 9565–9569. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i6.156>